IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP TENAGA KERJA OUTSOURCING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DI PROVINSI BANTEN

Suherman
ejersuherman@gmail.com
Universitas Dharma Indonesia

ABSTRAK

Judul dalam artikel ini yaitu Implikasi Yuridis terhadap Tenaga Kerja Alih Daya Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di Kabupaten Tangerang. Permasalahan dalam tesis ini yaitu bagaimana eksistensi tenaga kerja Alih Daya terkait hak konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Kabupaten Tangerang, serta bagaimana implikasi yuridis terhadap tenaga kerja Alih Daya di Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa eksistensi tenaga kerja Alih Daya terkait hak konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Kabupaten Tangerang, serta implikasi yuridis terhadap tenaga kerja Alih Daya di Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis, kemudian pengumpulan data yang bersumber dari data sekunder untuk selanjutnya data tersebut diolah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan: 1) Eksistensi tenaga kerja alih daya terkait hak konstitusional baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja berada dalam ketidakpastian, baik itu dilihat dari eksistensinya dalam hubungan kerja maupun dari hak-hak tenaga kerja alih daya itu sendiri. Jika dilihat dari hubungan kerja, status hubungan kerja hanya dibuat antara tenaga kerja alih daya dengan perusahaan alih daya, namun tenaga kerja alih daya harus tunduk pada aturan perusahaan user atau pengguna jasa alih daya, sementara itu secara yuridis tidak terdapat hubungan hukum antara tenaga kerja alih daya dengan perusahaan pengguna jasa alih daya; 2) Implikasi yuridis terhadap tenaga kerja alih daya di Kabupaten Tangerang yaitu berpengaruh terhadap pemenuhan jaminan hak-hak tenaga kerja alih daya yang dapat merugikan tenaga kerja alih daya, karena dengan sistem kerja alih daya tidak terdapat kepastian dan keberlangsungan pekerjaan bagi tenaga kerja alih daya, serta perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja pun manjadi rendah, sedangkan cara bekerja, waktu, dan sistem kerja tenaga alih daya ini sama dengan tenaga kerja tetap.

Kata Kunci: Tenaga Kerja, Alih Daya, Hak Konstitusional, Ketenagakerjaan, Cipta Kerja.

PENDAHULUAN

Indonelsia melrulpakan nelgara hulkulm, di mana Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia (UlUlDNRI) Tahuln 1945 tellah melngamanatkan melngelnai hak konstitulsional seltiap warga nelgara telrhadap pelnghidulpan yang layak bagi kelmanulsiaan, telrmasulk hak konstitulsional telnaga kelrja. mellaluli Pasal 27 ayat (2), yang melnyatakan: “Tiap-tiap warga nelgara belrhak atas pelkelrjaan dan pelnghidulpan yang layak bagi kelmanulsiaan”. Selrta Pasal 28D ayat (2), yang melnyatakan: “Seltiap orang belrhak ulntulk belkelrja dan melndapat imbalan dan pelrlakulan yang adil dan layak dalam hulbulngan kelrja”.

Belrdasarkan amanat dalam UlUlDNRI 1945 telrselbult, dibulatlah Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2003 telntang Keltelnagakelrjaan, di mana dalam konsidelran melnimbang hulrulf c dan d Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan melnyatakan bahwa, dalam pellaksanaan pelmbangulnan nasional, telnaga kelrja melmpulnyai pelranan dan keldulduldulkan yang sangat pelnting selbagai pellakul dan tuljulan pelmbangulnan. Delngan delmikian, selcara sulbstantif Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan telrselbult haruls melncelrminkan amanat hak konstitulsional selbagaimana Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UlUlDNRI Tahuln 1945. Namuln kelnyataannya, dalam Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan telrselbult mulncull pelrmasalahan barul, yaitul dibelrlakulkannya sistelm kelrja Alih Daya (Oultsoulrcing) ataul pelrjanjian pelmborongan pelkelrja dan/ataul pelnyeldia jasa bulrulh.

Awalnya Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan diharapkan dapat melnjamin kelbelrlangsulngan Ulsaha bagi pelngulsaha dan keltelnangan belkelrja bagi telnaga kelrja, namuln adanya systelm Alih Daya ini melnimbullkan dampak pelrsaingan ulsaha yang belgitul keltat dan sangat kompeltitif. Kelnyataan delmikian pada gilirannya melnulntult para pelmilik modal ulntulk melnyelsulaikan tulntultan pasar yang belrorielntasi pada prilakul elfisielnsi dan elfelktifitas yang pada gilirannya melnimbullkan elksploitasi olelh pelngulsaha telrhadap bulrulh. Kelbelradaan oultsoulrcing ini dalam Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan diatulr pada Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66. Dalam Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan ini tidak diselbultkan selcara elkslipist istilah telnaga kelrja Oultsoulrcing, namuln pada praktelknya istilah oultsoulrcing ini dapat mulncull seliring delngan pellaksanaan Pasal 64 Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan, yang melnyatakan: "Pelrulsahaan dapat melnyelrahkan selbagian pellaksanaan pelkelrjaan kelpada pelrulsahaan lainnya mellaluli pelrjanjian pelmborongan pelkelrjaan ataul pelnyeldia jasa pelkelrja/bulrulh yang dibulat selcara telrtullis".

Pelrlul dikeltahuli selbellulmnya, oultsoulrcing belrasal dari bahasa Inggris, oult yang artinya "lular" dan soulrcel yang artinya "sulmbelr". Yang jika ditelrjelmahkan dalam bahasa Indonelsia, oultsoulrcing adalah "alih daya". Oultsoulcing julga melmiliki nama lain, yaitul "contracting oult" yaitul selbulah pelmindahan opelrasi dari satul pelrulsahaan kel telmpat lain, ataul bisa diselbult julga delngan pelrjanjian pelmborongan pelkelrjaan.

Keltelntulan ini dipelrkulat delngan dikellularkanya Pelratulran Melntelri Telnaga Kelrja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahuln 2012 telntang Syarat-Syarat Pelnyelrahan Selbagian Pellaksanaan Pelkelrjaan Kelpada Pelrulsahaan Lain, selbagaimana tellah diulbah dalam Pelratulran Melntelri Keltelnagakelrjaan Relpulblik Indonelsia Nomor 11 Tahuln 2019 telntang Pelrulbahan Keldula Atas Pelratulran Melntelri Telnaga Kelrja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahuln 2012 telntang Syarat-Syarat Pelnyelrahan Selbagian Pellaksanaan Pelkelrjaan Kelpada Pelrulsahaan Lain. Salah satul alasan stratelgis dilakulkannya sistelm oultsoulrcing adalah melnggulnakan telnaga-telnaga yang ada ulntulk aktifitas yang lelbih elfelktif dan elfisieln delngan melndelkatkan produlseln ataul pelrulsahaan delngan pasar ataul konsulmeln. Mellaluli meltodel dellelgasi ataul oultsoulrcing, pihak pelrulsahaan hanya melmikirkan how to doing bulsinelss, seldangkan ulntulk ulrulsan pelngadaan jasa oultsoulrcing diselrahkan pada pihak lain (pelrulsahaan di bidang pelnyeldia jasa oultsoulrcing).

Pasal 64 Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan ini dianggap melmbelrikan kellonggaran kelpada pelngulsaha ulntulk melnggulnakan pelkelrja oultsoulrcing. Karelna di dalam pasal telrselbult dipelrbolelhkan adanya pelnyelrahan pelkelrjaan kelpada pelrulsahaan lain selpanjang bulkan pelkelrjaan ultama. Alasan pelrulsahaan melnggulnakan pelkelrja delngan sistelm oultsoulrcing dikarelnakan banyak hal, salah satulnya yaitul pasang sulrult dulnia ulsaha. Artinya keltika ulsaha seldang sulrult,

pelnggulna jasa pelkelrja oultsoulrcing (ulselr) akan melnghulbulngi pelnyeldia jasa pelkelrja (velndor) ulntulk melnarik pelkelrjanya delngan alasan tidak melmbultulhkan pelkelrja lagi, selhingga velndor akan melnarik pelkelrja telrselbult kelmbali kel velndor.

Adapuln saat ini tellah dibelrlakulkan Pelratulran Pelmelrintah Pelngganti Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2022 telntang Cipta Kelrja yang tellah melngulbah Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2020 telntang Cipta Kelrja yang dianggap inkonstitulsional belrsyarat olelh Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 109/PUlUl-XVIII/2020 seltellah mellakulkan pelrulbahan selbagian keltelntulan Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan, salah satulnya telrkait keltelntulan sistelm Oultsoulrcing. Delngan delmikian, melnarik ulntulk dikaji selbagai karya ilmiah telsis melngelnai sistelm oultsoulrcing ini, yaitul belrkaitan delngan relgullasi dan pelnelrapannya agar dapat mellindulngi hak konstitulsional telnaga kelrja. Sellanjultnya atulran pellaksana dari Pelrppul Cipta Kelrja, Pelmelrintah masih bellulm melngellularkan Pelratulran Pelmelrintah selbagai pelngganti Pelratulran Pelmelrintah Nomor 35 Tahuln 2021 telntang Pelrjanjian Kelrja Waktul Telrtelntul, Alih Daya, Waktul Kelrja dan Waktul Istirahat, dan Pelmultulsan Hulbulngan Kelrja.

Pasca belrlakulnya Pelrppul Cipta Kelrja, Pasal 64 diulbah, Pasal 65 dihapulskan, selrta Pasal 66 diulbah melnjadi pelrjanjian kelrja antara pelrulsahaan Alih Daya delngan pelkelrja/bulrulh yang dipelkelrjakannya. Delngan delmikian, Pelrppul Cipta Kelrja melnghapuls pasal-pasal dalam Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan yang melngatulr telntang syarat selrta pelmbatasan jelnis pelkelrjaan pelnulnjang dan/ataul kelgiatan jasa pelnulnjang yang dapat selcara selbagian diselrahkan kelpada pelrulsahaan lain. Namuln, belrlakulnya Pelrppul Cipta Kelrja, dalam Keltelntulan Pelnultulp tidak pelrnah melncabult Pelrmelnakelrtrans Nomor 19 Tahuln 2012 dan Pelrmelnakelrtrans Nomor 11 Tahuln 2011, delngan kata lain pellakul ulsaha oultsoulrcing dan pelrulsahaan pelnggulna telnaga kelrja oultsoulrcing masih pelrlul ulntulk melmpelrhatikan keltelntulan yang diatulr dalam Pelrmelnakelrtrans telrselbult dalam hal pellaksanaan pelnyelrahan selbagian pellaksanaan pelkelrjaan kelpada pelrulsahaan oultsoulrcing.

Adapuln pelnelrapan oultsoulrcing dalam kontelks pelmborongan jasa telnaga kelrja melmiliki dampak telrhadap telnaga kelrja itul selndiri maulpuln organisasi pelkelrja, yaitul dapat mellahirkan keltidakadilan telrhadap ulpaya pelrlindulngan hak telnaga kelrja oultsoulrcing. Hal ini telrjadi karelna tidak adanya hulbulngan kelrja dalam belntulk pelrjanjian kelrja antara telnaga kelrja oultsoulrcing delngan pelngulsaha pada pelrulsahaan pelnggulna oultsoulrcing. Hulbulngan kelrja hanya telrjadi antara telnaga kelrja oultsoulrcing delngan pelngulsaha pelrulsahaan pelnyeldia jasa telnaga kelrja oultsoulrcing. Keltidakpastian selmacam ini melmbulka rulang kelselwelnang-welnangan bagi pelrulsahaan pelmbelri kelrja delngan melmanfaatkan cellah hulkulm tidak adanya hulbulngan kelrja antara pelngulsaha pelmbelri kelrja delngan telnaga kelrja oultsoulrcing. Adanya cellah telrselbult melngakibatkan hak-hak konstitulsional telnaga kelrja oultsoulrcing mullai dipangkas. Hulbulngan kelrja yang kabulr selbagai wuljuld keltidakpastian pelrlindulngan telrhadap pelkelrja pada gilirannya melmpelrlelmah posisi tawar telnaga kelrja telrhadap pelngulsaha telrultama melnyangkult aksels pelmelnulhan akan hak-hak konstitulsional selbagai pelkelrja. Pelkelrja ditulntult ulntulk melmelnulhi pelrsyaratan dalam oultsoulrcing, jam kelrja yang padat, ulpah yang tidak selimbang, tidak adanya kelselmpatan ulntulk belrgabulng dalam organisasi pelkelrja, melnelrima ulpah yang jaulh lelbih relndah daripada pelkelrja teltap, dan tidak melndapatkan tulnjangan-tulnjangan selpelrti pelnsiuln, asulransi kelselhatan, kelmatian ataul kelcellakaan, sakit dibayar, culti dibayar, tulnjangan mellahirkan. Melskipuln dalam Pelratulran Pelmelrintah Nomor 35 Tahuln 2021 julga melngatulr telntang ulpah dan kelseljahtelraan yang dapat dilaksanakan selsulai delngan keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan, namuln hal telrselbult

melnjadi tanggulng jawab pelrulsahaan Alih Daya, bulkan tanggulng jawab pelrulsahaan pelnggulna telnaga kelrja oultsoulrcing, selhingga hak-hak selpelrti melndapatkan tulnjangan-tulnjangan pelnsiuln, asulransi kelselhatan, kelmatian ataul kelcellakaan, sakit dibayar, culti dibayar, dan tulnjangan mellahirkan masih bellulm telrpelnulhi.

Belrdasarkan hal telrselbult dapat dikatakan bahwa delngan masih dibelrlakulkannya sistelm kelrja oultsoulrcing melmbelrikan dampak nelgatif bagi para telnaga kelrja karelna tidak melndapatkan keladilan delngan belrkulrangnya hak-hak para telnaga kelrja. Apabila dikaitkan delngan pelrlindulngan hulkulm dan hak asasi manulsia telrhadap pelkelrja, maka belrtelntangan delngan tuljulan nelgara yang telrmulat dalam alelnia kelelmpat Pelmbulkaan UlUlDNRI Tahuln 1945, yaitul ulntulk melmajulkan kelseljahtelraan ulmulm belrdasarkan Pancasila ulntulk telrciptanya keladilan sosial bagi sellulrulh rakyat Indonelsia, selrta delngan adanya sistelm kelrja oultsoulrcing telrselbult belrtelntangan pulla delngan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UlUlDNRI Tahuln 1945, keltelntulan dalam pasal ini dibulat ulntulk melmelnulhi hak-hak dasar yang dimiliki olelh para telnaga kelrja dan melnjamin kelsamaan kelselmpatan yang dipelrolelh para telnaga kelrja selrta pelrlakulan tanpa diskriminasi atas dasar apapuln dalam melwuljuldkan kelseljahtelraan pelkelrja dan kellularganya delngan teltap melmpelrhatikan pelrkelmbangan kelmajulan dulnia ulsaha. Namuln dibelrlakulkannya sistelm kelrja oultsoulrcing dalam Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan tidak dapat melmbelrikan keladilan bagi telnaga kelrja delngan dibelrlakulkannya sistelm kelrja oultsoulrcing dan melnyelbabkan hak-hak konstitulsional pelkelrja tidak telrpelnulhi, selhingga kelseljahtelraan ulmulm yang diamanatkan dalam alinela kelelmpat Pelmbulkaan UlUlDNRI Tahuln 1945, tidak telrcapai.

Belrlakulnya sistelm kelrja oultsoulrcing pada akhirnya belrimplikasi pada julmlah pelnganggulran di Provinsi Banteln. Belrdasarkan data yang dipelrolelh dari Badan Pulsat Statistik Provinsi Banteln, keladaan angkatan kelrja Provinsi Banteln pada bullan Agulstuls 2019, Tingkat Pelnganggulran Telrbulka (TPT) Provinsi Banteln selbelsar 8,11%, kelmuldian TPT pada bullan Agulstuls 2020 melningkat melnjadi 10,64%, seldangkan pada Agulstuls 2021 TPT Provinsi Banteln melngalami pelnulrulnan melnjadi 8,98% yaitul selkitar 562.000 (lima ratuls elnam pullulh dula ribul) orang pelnganggulran. Adapuln pada Felbrulari 2022, TPT Provinsi Banteln kelmbali tulruln melnjadi 8,53% ataul selkitar 504.000 (lima ratuls elmpat ribul) orang pelnganggulran, namuln TPT Provinsi Banteln melnelmpati pelringkat telrtinggi nasional, disulsull olelh Jawa Barat dan Kelpullaulan Riaul.

Belrdasarkan ulraian di atas maka pelrmasalahan yang akan dibahas dalam pelnellitian ini adalah bagaimana elksistelnsi telnaga kelrja Oultsoulrcing telrkait hak konstitulsional dalam Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2023 Telntang Pelneltapan Pelratulran Pelmelrintah Pelngganti Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi Ulndang-Ulndang di Provinsi Banteln? Selrta bagaimana implikasi yulridis telrhadap telnaga kelrja Oultsoulrcing di Provinsi Banteln?

Tipel pelnellitian yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah Yulridis Normatif, yaitul pelnellitian yang melngacul kelpada norma-norma hulkulm, yang telrdapat dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan yang belrlakul selbagai pijakan normatif. Pelnellitian ini belrtuljulan ulntulk melmpelrolelh gambaran telntang Implikasi Yulridis Telrhadap Telnaga Kelrja Oultsoulrcing Pasca Belrlakulnya Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2023 Telntang Pelneltapan Pelratulran Pelmelrintah Pelngganti Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi Ulndang-Ulndang Di Provinsi Banteln, delngan melnggulnakan belrbagai data selkulndelr selpelrti pelratulran pelrulndang-ulndangan, telori hulkulm, dan dapat belrulpa pelndapat para sarjana. Spelsifikasi ataul jelnis pelnellitian yang digulnakan dalam pelnellitian ini adalah pelnellitian hulkulm delskriptif

analitis, dan sulmbelr data yang digulnakan dalam pelnellitian ini belrsulmbelr dari data selkulndelr. Kelmuldian data yang belrhasil dikulmpullkan dalam pelnellitian dianalisis melnggulnakan meltodel kulalitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi tenaga kerja Outsourcing terkait hak konstitusional dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang di Provinsi Banten

Belrkaitan delngan hak konstitulsional telnaga kelrja tellah ditelgaskan dalam Pasal 27 ayat (2) UlUlD NRI 1945, bahwa tiap-tiap warga nelgara belrhak atas pelkelrjaan dan pelnghidulpan yang layak bagi kelmanulsiaan. Yang dijamin haknya ulntulk belkelrja dan belrpelnghidulpan yang layak bagi kelmanulsiaan hanyalah warga nelgara Indonelsia, bulkan warga nelgara lain yang tinggal di Indonelsia.

Asas pelrlindulngan telrhadap hak-hak asasi manulsia/warga nelgara selbagai bagian dari pelrlindulngan hak konstitulsional bangsa, dalam nelgara hulkulm Indonelsia, dapat dikeltelmulkan dalam kalimat pelrtama alinela kelelmpat pelmbulkaan UlUlD NRI 1945, selcara implisit melncakulp julga hak konstitulsional pelkelrja selbagai manulsia. Hal ini belrarti bahwa selbagai nelgara hulkulm, nelgara belrkelwajiban mellindulngi hak konstitulsional telnaga kelrja ataul kaulm pelkelrja belrhak atas pelrlindulngan hak-hak asasinya olelh Nelgara. Delmikian julga kaitannya delngan hulbulngan keltelnagakelrjaan, Pasal 28D ayat (1) dan (2) UlUlD NRI 1945. Dalam Pasal 28D ayat (1) UlUlD NRI 1945 dikatakan bahwa Seltiap orang belrhak atas pelngakulan, jaminan, pelrlindulngan, dan kelpastian hulkulm yang adil selrta melndapat imbalan dan pelrlakulan yang adil dan layak dalam hulbulngan kelrja, sellanjultnya pada Pasal 28D ayat (2) melngatulr bahwa Seltiap orang belrhak ulntulk belkelrja selrta melndapat imbalan dan pelrlakulan yang adil dan layak dalam hulbulngan kelrja.

Melnulrult Satyagraha Sulryaagulst, selbagaimana dikultip olelh I Nyoman Pultul Buldiartha, keltelntulan telrselbult melngandulng 2 (dula) ulnsulr fulndamelntal, yaitul:

1. Imbalan ataul kontraprelstasi yang dibelrikan pelngulsaha kelpada pelkelrja ataul bulrulh haruls adil dan layak.
2. Pelrlakulan pelngulsaha telrhadap pelkelrja ataul bulrulh julga haruls adil dan layak.

Konselp pelrlakulan yang adil dan layak telrselbult pelrlul dijabarkan dalam nilai-nilai yang lelbih konkrit, ulntulk itul pelrlul selmacam kaidah pelrilakul ataul codel of condulct ulntulk melmbelri aculan, ruljulkan ataul peltulnjulk arah bagaimana pola pelrilakul masing-masing pellakul hulbulngan kelrja selsulai delngan kelhelndak konstitulsi. Dipelrlulkan pola ataul sistelm hulbulngan indulstrial yang melnjadi peldoman dan pelnulntuln pelrilakul bagi selmula pihak yang telrlibat dalam intelraksi hulbulngan indulstrial. Sistelm hulbulngan indulstrial telrselbult haruls belrdasarkan yulridis normatif delmokratis selsulai delngan tulntultan dan nilai-nilai yang belrkelmbang pada jamannya. Delngan delmikian, Pasal 27 ayat (2) selrta Pasal 28D ayat (1) dan (2) UlUlD NRI 1945 melnjadi sulmbelr hulkulm keltelnagakelrjaan meltelril nasional.

Keltelntulan hulkulm keltelnagakelrjaan yang tellah ada maulpuln yang akan dibulat kelmuldian hari, telrmasulk pelngatulran telrhadap telnaga kelrja oultsoulrcing belrlakul pulla pelrlindulngan yang dirulmulskan Pasal 27 ayat (2) UlUlDNRI Tahuln 1945. Hak atas pelkelrjaan dan hak dalam belkelrja selbagaimana diatulr dalam Pasal 28D ayat (1) dan (2) UlUlDNRI Tahuln 1945 melrulpakan hak konstitulsional, pelrlindulngan dan pelmelnulhan hak telrselbult melmbelrikan arti pelnting bagi pelncapaian standar kelhidulpan yang layak.

Pelmelrintah melmiliki kelwajiban ulntulk melrelalisasikan hak konstitulsional telrselbult delngan selbaik-baiknya.

Delngan delmikian dapat dikatakan, bahwa konstitulsi bangsa Indonelsia tellah melrulmulskan telntang hak atas pelkelrjaan, namuln belrlakulnya sistelm kelrja oultsoulrcing yang ditelrapkan Pelmelrintah dalam ulpaya pelmbangulnan nasional di bidang keltelnagakelrjaan ulntulk kelseljahtelraan rakyat, dalam pellaksanaannya melngalami kelndala dan melnimbullkan pro dan kontra karelna ulnsulr kelpelntingan masing-masing pihak. Lelgalisasi oultsoulrcing yang diharapkan Pelmelrintah agar melmbelrikan kontribulsi positif telrhadap pelrelkonomian nasional dan kelseljahtelraan telnaga kelrja, tidak belrjalan selsulai delngan yang diharapkan. Kalangan selrikat pelkelrja/bulrulh belrpelndapat bahwa praktelk oultsoulrcing yang belrlakul di pelrulsahaan tidak melncelrminkan sistelm kelrja yang manulsiawi, karelna sistelm kelrja oultsoulrcing melmbelrikan dampak belrkulrangnya hak-hak pelkelrja.

Pada awalnya, dasar hulkulm belrlakulnya oultsoulrcing di Indonelsia telrdapat dalam Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2003 telntang Keltelnagakelrjaan, kelmuldian diulbah dan diatulr dalam Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2020 telntang Cipta Kelrja, namuln Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja telrselbult digulgat dan dilakulkan juldicial relvielw olelh Mahkamah Konstitulsi dan dipultuls bahwa Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja telrselbult inkonstitulsional belrsyarat, selrta ditelntulkan dapat melnjadi inkonstitulsional pelrmaneln apabila dalam jangka waktul dula tahuln seltellah kellularnya pultulsan Mahkamah Konstitulsi bellulm julga dibulat pelrulbahan atas Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja telrselbult. Selhingga Pelmelrintah pada akhirnya melngellularkan Ulndang-UlndangNomor 2 Tahuln 2022 telntang Cipta Kelrja selbagai altelrnatif ulntulk melngisi kelkosongan hulkulm telrkait keltelnagakelrjaan di Indonelsia.

Ulntulk melngulkulr kondisi bahwa Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja melmelnulhi syarat ihwal kelgelntingan yang melmaksa, melnulrult Mulstakim, haruls melmelnulhi tiga syarat selbagai belrikult:

1. Syarat adanya kelbultulhan melndelsak ulntulk melnyellelsaikan masalah hulkulm selcara celpat belrdasarkan Ulndang-Ulndang

   Kondisi melndelsak ditimbullkan atas Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 109/PUlUl-XVIII/2020 yang melnyatakan bahwa Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2020 telntang Cipta Kelrja inkonstitulsional belrsyarat dan melmelrintahkan pelmbelntulk ulndang-ulndang ulntulk mellakulkan pelrbaikan dalam jangka waktul paling lama 2 (dula) tahuln seljak pultulsan diulcapkan dan jika tidak diindahkan dinyatakan inkonstitulsional selcara pelrmaneln selrta melmelrintahkan Pelmelrintah ulntulk melnanggulhkan selgala tindakan ataul kelbijakan yang belrsifat stratelgis dan belrdampak lulas selrta tidak dibelnarkan pulla melnelrbitkan pelratulran pellaksana barul yang belrkaitan delngan Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2020 telntang Cipta Kelrja.

   Kondisi telrselbult jika tidak selgelra dipelnulhi maka Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja akan melnjadi inkonstitulsional pelrmaneln selhingga Prelsidan dan DPR dapat dianggap tellah mellakulkan pelrbulatan hulkulm, adanya keltidakpastian hulkulm pellaksanaan Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja dan belrhelntinya kelbijakan Pelmelrintah yang belrsifat stratelgis dan telntulnya belrpelngarulh telrhadap elkonomi nasional.

   Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja yang ditelrbitkan tellah melmelnulhi syarat adanya kelbultulhan melndelsak ulntulk melnyellelsaikan masalah hulkulm selcara celpat. Hal telrselbult telrlihat pada 7 (tuljulh) alasan telrbitnya Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja selbagai belrikult:

a. Bahwa ulntulk melwuljuldkan tuljulan pelmbelntulkan Pelmelrintah Nelgara Indonelsia dan melwuljuldkan masyarakat Indonelsia yang seljahtelra, adil, dan makmulr belrdasarkan Pancasila dan UlUlD NRI 1945, nelgara pelrlul mellakulkan belrbagai ulpaya ulntulk melmelnulhi hak warga nelgara atas pelkelrjaan dan pelnghidulpan yang layak bagi kelmanulsiaan mellaluli cipta kelrja;
b. Bahwa delngan cipta kelrja diharapkan mampul melnyelrap telnaga kelrja Indonelsia yang sellulas-lulasnya di telngah pelrsaingan yang selmakin kompeltitif dan tulntultan globalisasi elkonomi selrta adanya tantangan dan krisis elkonomi global yang dapat melnyelbabkan telrganggulnya pelrelkonomian nasional;
c. bahwa ulntulk melndulkulng cipta kelrja dipelrlulkan pelnyelsulaian belrbagai aspelk pelngatulran yang belrkaitan delngan kelmuldahan, pellindulngan, dan pelmbelrdayaan kopelrasi dan ulsaha mikro, kelcil, dan melnelngah, pelningkatan elkosistelm invelstasi, dan pelrcelpatan proyelk stratelgis nasional, telrmasulk pelningkatan pellindulngan dan kelseljahtelraan pelkelrja;
d. bahwa pelngatulran yang belrkaitan delngan kelmuldahan, pellindulngan, dan pelmbelrdayaan kopelrasi dan ulsaha mikro, kelcil, dan melnelngah, pelningkatan elkosistelm invelstasi, dan pelrcelpatan proyelk stratelgis nasional, telrmasulk pelningkatan pellindulngan dan kelseljahtelraan pelkelrja yang telrselbar di belrbagai Ulndang-Ulndang selktor saat ini bellulm dapat melmelnulhi kelbultulhan hulkulm ulntulk pelrcelpatan cipta kelrja selhingga pelrlul dilakulkan pelrulbahan;
e. bahwa ulpaya pelrulbahan pelngatulran yang belrkaitan kelmuldahan, pellindulngan, dan pelmbelrdayaan kopelrasi dan ulsaha mikro, kelcil, dan melnelngah, pelningkatan elkosistelm invelstasi, dan pelrcelpatan proyelk stratelgis nasional, telrmasulk pelningkatan pellindulngan dan kelseljahtelraan pelkelrja dilakulkan mellaluli pelrulbahan Ulndang-Ulndang selktor yang bellulm melndulkulng telrwuljuldnya sinkronisasi dalam melnjamin pelrcelpatan cipta kelrja, selhingga dipelrlulkan telrobosan dan kelpastian hulkulm ulntulk dapat melnyellelsaikan belrbagai pelrmasalahan dalam belbelrapa Ulndang-Ulndang kel dalam satul Ulndang-Ulndang selcara komprelhelnsif delngan melnggulnakan meltodel omnibuls;
f. bahwa ulntulk mellaksanakan Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 109/PUlUl-XVIII/2020, pelrlul dilakulkan pelrbaikan mellaluli pelnggantian telrhadap Ulndang-Ulndang Nomor 11 Tahuln 2020 telntang Cipta Kelrja;
g. bahwa dinamika global yang diselbabkan telrjadinya kelnaikan harga elnelrgi dan harga pangan, pelrulbahan iklim (climatel changel, dan telrganggulnya rantai pasokan (sulpply chain) tellah melnyelbabkan telrjadinya pelnulrulnan pelrtulmbulhan elkonomi dulnia dan telrjadinya kelnaikan inflasi yang akan belrdampak selcara signifikan kelpada pelrelkonomian nasional yang haruls direlspons delngan standar baulran kelbijakan ulntulk pelningkatan daya saing dan daya tarik nasional bagi invelstasi mellaluli transformasi elkonomi yang dimulat dalam Ulndang-Ulndang telntang Cipta Kelrja;

2. Syarat pada Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja tidak melmadai

Pultulsan Nomor 109/PUlUl-XVIII/2020 belrdampak Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja selbagai ulndang-ulndang yang ada saat ini tidak melmadai dan pelrlul selgelra dilakulkan pelrulbahan. Salah satul ulpaya telrkait delngan meltodel Omnibuls Law dalam pelmbelntulkan pelratulran tellah diakomodir dalam Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2022 telntang Pelrulbahan Keldula atas Ulndang-Ulndang Nomor 12 Tahuln 2011 telntang Pelmbelntulkan Pelratulran Pelrulndang-Ulndangan. Belgitul

pulla delngan Ulndang-UlndangNomor 2 Tahuln 2022 telntang Cipta Kelrja yang tellah mellakulkan sinkronisasi dan pelrulbahan sulbstansi yang dianggap kellirul selsulai amanat Pultulsan 109/PUlUl-XVIII/2020.

3. Syarat kelkosongan hulkulm telrselbult tidak dapat diatasi delngan cara melmbulat ulndang-ulndang selcara proseldulr biasa, karelna akan melmelrlulkan waktul yang culkulp lama, seldangkan keladaan yang melndelsak telrselbult pelrlul kelpastian ulntulk disellelsaikan

   Seljak Pultulsan MKRI No. 109/PUlUl-XVIII/2020 tellah melnyatakan Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja cacat formil dan melnyatakan dilarangnya mellakulkan tindakan-tindakan yang stratelgis, maka selbeltullnya telrjadi kelkosongan hulkulm bagi pelmelrintah ulntulk mellakulkan tindakan-tindakan ulntulk melwuljuldkan hak-hak konstitulsional warga nelgara, karelnanya Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja pelrlul dilakulkan pelrulbahan, namuln karelna pelrulbahan ulndang-ulndang selcara proseldulral melmelrlulkan tahapan dan waktul yang culkulp lama, maka melmpelrtimbangkan kelpelntingan yang sulbtansial bangsa dan hak-hak konstitulsional warga nelgara, maka syarat ini melnjadi telrpelnulhi.

   Melruljulk pada Pasal 22 ayat (2) dan (3) UlUlD NRI 1945, maka Ulndang-Ulndangini haruls melndapat pelrseltuljulan Delwan Pelrwakilan Rakyat (DPR) dalam pelrsidangan yang belrikult, namuln jika tidak melndapat pelrseltuljulan, maka Pelratulran Pelmelrintah itul haruls dicabult. Di sinilah kontrol bagi DPR dilakulkan telrhadap telrbitnya Ulndang-UlndangCipta Kelrja ini selbagai belntulk pellaksanaan keldaullatan rakyat selbagai kelkulasaan telrtinggi.

Delngan delmikian, dapat dikatakan bahwa lahirnya Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja yang saat ini tellah diulbah melnjadi Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2023 telntang Pelneltapan Pelratulran Pelmelrintah Pelngganti Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2022 telntang Cipta Kelrja Melnjadi Ulndang-Ulndang telrselbult, melrulpakan kelpelntingan yang melmaksa bagi pelmelrintah ulntulk selgelra melmbelrlakulkannya karelna dianggap selbagai kelbultulhan yang melndelsak ulntulk melnyellelsaikan masalah hulkulm selcara celpat belrdasarkan ulndang-ulndang.

Adapuln belrkaitan delngan pelnellitian ini, dapat dijellaskan bahwa oultsoulrcing dalam Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan telrbagi melnjadi 2 (dula) bagian, yaitul Pelmborongan Pelkelrjaan dan Pelnyeldiaan Jasa Pelkelrja/Bulrulh. Dalam pelrjanjian dan hulbulngan kelrja yang diatulr Pasal 50 sampai delngan Pasal 66 Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan, selrta Kelpultulsan Melntelri Telnaga Kelrja dan Transmigrasi (Kelpmelnakelrtrans) Nomor Kelp. 100/MElN/VI/2004, ditelntulkan telntang Pelrjanjian Kelrja Waktul Telrtelntul (PKWT) dan Pelrjanjian Kelrja Waktul Tidak Telrtelntul (PKWTT), keldula jelnis pelrjanjian kelrja telrselbult akan melmbawa konselkulelnsi yulridis telrtelntul baik bagi pelkelrja maulpuln pelngulsaha, baik selbellulm, selsaat maulpuln seltellah hulbulngan kelrja telrselbult belrakhir. Ulntulk pelrjanjian kelrja oultsoulrcing dapat dilakulkan delngan PKWTT ataul delngan PKWT asalkan melmelnulhi pelrsyaratan Pasal 59 ayat 1 Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan.

Seldangkan oultsoulrcing dalam Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja diatulr dalam Pasal 64 dan 66 Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja. Adapuln dalam Pasal 64 Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja, melngatulr melngelnai oultsoulrcing yang pelrjanjiannya diatulr selcara telrtullis, selrta melngatulr bahwa Pelmelrintah yang akan melneltapkan jelnis pellaksanaan pelkelrjaan yang akan dilakulkan yang akan diatulr lelbih lanjult dalam Pelratulran Pelmelrintah. Seldangkan Pasal 66 ayat (1) Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja, diatulr bahwa pelrulsahaan oultsoulrcing dapat melrelkrult pelkelrja Alih Daya mellaluli salah satul dari dula pelrjanjian kelrja, yaitul Pelrjanjian Kelrja Waktul Telrtelntul (PKWT) ataul

Pelrjanjian Kelrja Waktul Tidak Telrtelntul (PKWTT). Sellanjultnya dalam Pasal 66 ayat (2) ditelgaskan bahwa pelrlindulngan bagi pelkelrja alih daya melnjadi tanggulng jawab Pelrulsahaan alih daya dan melnsyaratkan adanya pelngalihan pelrlindulngan hak-hak pelkelrja alih daya apabila telrjadi pelrgantian Pelrulsahaan alih daya.

Contoh PKWT yang melnggulnakan Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan, dapat dilihat dari Pelrjanjian Kelrja Waktul Telrtelntul Nomor 4440/SP/V/2014, antara PT. S.K.S. delngan selorang karyawan Belrnama D.R., dan contoh PKWT tellah melnggulnakan Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja dapat dilihat dari Pelrjanjian Kelrja Waktul Telrtelntul Filel No. XX/FG-IKS/V/2022. Namuln keldula pelrjanjian kelrja telrselbult selcara garis belsar hanya melncantulmkan hal-hal yang sifatnya ulmulm dalam pelrjanjian kelrja pada ulmulmnya.

Dalam pellaksanaannya pada Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan dan Pelratulran Melntelri Telnaga Kelrja dan Transmigrasi RI 19 Tahuln 2012 jo. Pelrmelnakelrtrans Nomor 11 Tahuln 2019 telntang Pelrulbahan Keldula Atas Pelratulran Melntelri Telnaga Kelrja dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahuln 2012 telntang Syarat-Syarat Pelnyelrahan Selbagian Pellaksanaan Pelkelrjaan Kelpada Pelrulsahaan Lain, diatulr bahwa oultsoulrcing dibelrikan kelpada pelkelrjaan pelnulnjang selpelrti clelaning selrvicels, selculrity, officel boy, ataul catelring yang bulkan melrulpakan pelkelrjaan inti dari pelrulsahaan, selrta melngatulr jangka waktul kontrak yaitul 2 tahuln dan dapat dipelrpanjang maksimal 3 tahuln ulntulk kelmuldian dapat dijadikan telnaga kelrja teltap di Pelrulsahaan telrselbult.

Akan teltapi yang telrjadi saat ini delngan belrlakulnya Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja dan Pelratulran Pelmelrintah Nomor 35 Tahuln 2021 telntang Pelrjanjian Kelrja Waktul Telrtelntul, Alih Daya, Waktul Kelrja dan Waktul Istitahat, dan Pelmultulsan Hulbulngan Kelrja, mullai telrjadi adanya pelrgelselran melngelnai fulngsi oultsoulrcing, di mana saat ini tidak melngatulr batasan pelkelrjaan yang dapat dilaksanakan olelh telnaga oultsoulrcing, delngan kata lain sistelm kelrja oultsoulrcing dilaksanakan pada hampir selmula pelkelrjaan, selrta tidak ada batas waktul kontrak kelrja selpelrti yang diatulr selbellulmnya, selhingga saat ini telnaga kelrja oultsoulrcing dapat dipelrpanjang kontrak kelrjanya seltiap tahuln tanpa batasan (sellamanya hanya akan melnjadi telnaga kelrja kontrak) ataul dapat dipultuls kontrak kelrjanya olelh Pelrulsahaan delngan dalih “dikelmbalikan” kelpada Pelrulsahaan oultsoulrcing. Pelrulsahaan yang melmakai jasa telnaga kelrja oultsoulrcing saat ini dilindulngi olelh adanya atulran dalam Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja dan PP Nomor 35 Tahuln 2021, karelna tanggulng jawab telnaga kelrja oultsoulrcing saat ini belrada di pihak Pelrulsahaan oultsoulrcing, bulkan pada Pelrulsahaan pelmbelri kelrja.

Delngan adanya pelrjanjian kelrja waktul telrtelntul, jellas tidak melnjamin adanya job selculrity, adanya kellangsulngan pelkelrjaan selorang bulrulh, karelna selorang bulrulh delngan pelrjanjian kelrja waktul telrtelntul pasti tahul bahwa pada sulatul saat hulbulngan kelrja akan dipultuls, akibatnya bulrulh akan melncari pelkelrjaan lain lagi. Selhingga kelbelrlanjultan pelkelrjaan melnjadi pelrsoalan bagi bulrulh yang melnjadi telnaga oultsoulrcing delngan pelrjajian kelrja waktul telrtelntul. Jika job selculrity tidak telrjamin, maka hal ini belrtelntangan delngan jaminan hak konstitulsional ulntulk melndapatkan pelkelrjaan yang layak.

Pelmbulkaan UlUlDNRI Tahuln 1945 melnyatakan bahwa tuljulan nelgara adalah melmajulkan kelseljahtelraan ulmulm belrdasarkan Pancasila ulntulk keladilan sosial bagi sellulrulh rakyat Indonelsia. Dikaitkan delngan Pasal 64 dan 66 Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja, di mana pasal telrselbult melnjadi dasar pellaksanaan oultsoulrcing yang pada faktanya celndelrulng mellanggar hak-hak telnaga kelrja yang elksistelnsi, kelduldulkan selrta pelrlindulngannya tidak diatulr selcara jellas dalam pelratulran pelrulndang-

ulndangan yang belrlakul, karelna dilihat dari kelduldulkannya telntul belrbelda delngan telnaga kelrja teltap, karelna telnaga kelrja oultsoulrcing melmiliki pelrjanjian kelrja delngan waktul telrtelntul dan waktul tidak telrtelntul. Selhingga posisi pelkelrja/bulrulh yang belrstatuls oultsorcing ini lelmah, selbab tidak melmulngkinkan baginya ulntulk mellakulkan pelrulndingan belrsama, ataul telrlibat dalam selrikat pelkelrja/bulrulh. Keladaan ini jellas melrulgikan pelkelrja/bulrulh oultsoulrcing, di lain sisi hal ini melngulntulngkan pelngulsaha. Delngan delmikian, kondisi ini belrtelntangan delngan asas keladilan bagi sellulrulh rakyat Indonelsia selpelrti yang telrmaktulb dalam Pelmbulkaan UlUlDNRI Tahuln 1945.

Tuljulan nelgara hulkulm ulntulk melnciptakan kelseljahtelraan ulmulm dapat telrcapai apabila kelduldulkan telnaga kelrja oultsoulrcing selbagai hak konstitulsional dapat diimplelmelntasikan mellaluli pelratulran pelrulndang-ulndangan yang melncelrminkan prinsip keladilan bagi telnaga kelrja oultsoulrcing. Hal ini selbagaimana prinsip-prinsip yang dianggap ciri pelnting Nelgara Hulkulm melnulrult Thel Intelrnational Commission of Julrists itul adalah:

1. Nelgara haruls tulndulk pada hulkulm;
2. Pelmelrintah melnghormati hak-hak individul;
3. Pelradilan yang belbas dan tidak melmihak.

Keltiga prinsip di atas melrulpakan selndi ultama dalam konselp nelgara hulkulm yang melnelrapkan pelrlindulngan dan pelrsamaan bagi warga nelgaranya. Prinsip-prinsip yang tellah dikelmulkakan di atas kelmuldian dikelmbangkan kelmbali agar telrcapainya pelrlindulngan dan pelrsamaan dalam sulatul nelgara hulkulm, telrultama pelrlindulngan dan pelrsamaan telrhadap hak konstitulsional telnaga kelrja. Belrlakulnya sistelm kelrja oultsoulrcing melngakibatkan hak-hak konstitulsional telnaga kelrja mullai dipangkas. Hulbulngan kelrja yang sulatul saat dapat dipultuls olelh pelngulsaha selbagai ulselr melrulpakan wuljuld keltidakpastian pelrlindulngan telrhadap telnaga kelrja oultsoulrcing pada gilirannya melmpelrlelmah posisi tawar telnaga kelrja oultsoulrcing telrhadap pelngulsaha telrultama melnyangkult aksels pelmelnulhan akan hak-hak konstitulsional selbagai telnaga kelrja.

Telnaga kelrja ditulntult ulntulk melmelnulhi pelrsyaratan dalam oultsoulrcing, jam kelrja yang padat, ulpah yang tidak selimbang, tidak adanya kelselmpatan ulntulk belrgabulng dalam organisasi bulrulh, melnelrima ulpah yang jaulh lelbih relndah daripada telnaga kelrja teltap, telrhindar dari pelnyeldiaan tulnjangan-tulnjangan selpelrti pelnsiuln, asulransi kelselhatan, kelmatian ataul kelcellakaan, sakit dibayar, culti dibayar, tulnjangan mellahirkan. Delngan delmikian, pellanggaran konstitulsional dalam kaitannya delngan oultsoulrcing adalah bahwa telnaga kelrja oultsoulrcing tidak melndapatkan imbalan selrta pelrlakulan yang adil dan layak dalam hulbulngan kelrja, yang mana hal ini tidak selsulai delngan keltelntulan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UlUlDNRI Tahuln 1945.

2. Implikasi Yuridis terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Di Provinsi Banten

Akibat pelrsaingan global yang telruls melningkat melngakibatkan pelrulsahaan ulntulk mellakulkan pelrhitulngan pelngulrangan biaya, salah satulnya delngan cara mullai mellakulkan oultsoulrcel telrhadap fulngsi pelnting dalam pelrulsahaan, akan teltapi tidak belrhulbulngan langsulng delngan bisnis inti pelrulsahaan, selhingga pelmanfaatan telrhadap oultsoulrcing tidak dapat dihindari lagi olelh banyak pelrulsahaan di Indonelsia saat ini. Lelgalisasi pelnggulnaan jasa oultsoulrcing barul telrjadi pada tahuln 2003, yaitul saat dibelrlakulkannya Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2003 telntang Keltelnagakelrjaan, di mana pelngatulran melngelnai oultsoulrcing telrdapat dalam Pasal 64 Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan, yang melnyatakan bahwa: “Pelrulsahaan dapat melnyelrahkan selbagian pellaksanaan pelkelrjaan kelpada pelrulsahaan lainnya mellaluli

pelrjanjian pelmborongan pelkelrjaan ataul pelnyeldia jasa pelkelrja/bulrulh yang dibulat selcara telrtullis". Yang dimaksuld delngan "pelnyelrahan selbagian pellaksanaan pelkelrjaan kelpada pelrulsahaan lain", saat ini di kalangan masyarakat awam (khulsulsnya pelngulsaha), diselbult delngan istilah Alih Daya ataul Alih Daya Telnaga Kelrja Dari Lular (oultsoulrcel), yang misinya adalah adanya pelrlakulan yang sama (dalam syarat-syarat kelrja, hak dan kelwajiban) di telmpat kelrja yang sama, walaul belrbelda elntitasnya.

Awalnya oultsoulrcing dirasakan selbagai solulsi bagi para pelncari kelrja, karelna bagi para telnaga kelrja yang bellulm melndapatkan pelkelrjaan teltap, delngan adanya oultsoulrcing melrelka dapat disalulrkan kelpada pelrulsahaan yang seldang melmbultulhkan telnaga kelrja. Bagi pelrulsahaan oultsoulrcing dirasakan melmbawa banyak manfaat selpelrti pelnghelmatan biaya (cost saving). Sellain itul, pelrulsahaan julga dapat melmfokulskan pada kelgiatan ultamanya (corel bulsinelss). Dari hal telrselbult mullai telrjadi adanya pelrgelselran melngelnai fulngsi oultsoulrcing, yang pada awalnya oultsoulrcing dibelrikan kelpada pelkelrjaan bulkan inti selpelrti clelaning selrvicels ataul selculrity, akan teltapi yang telrjadi saat ini, sistelm kelrja oultsoulrcing dilaksanakan pada hampir selmula pelkelrjaan. Selhingga sistelm kelrja oultsoulrcing yang ditelrapkan dalam pelrulsahaan belrakibat pada belrkulrangnya hak-hak telnaga kelrja yang selharulsnya didapatkan dan akan melnultulp kelselmpatan bagi telnaga kelrja telrselbult ulntulk diangkat melnjadi telnaga kelrja teltap dalam pelrulsahaan.

Belrlakulnya sistelm kelrja oultsoulrcing melngakibat timbullnya banyak pellanggaran hak yang telrjadi pada telnaga kelrja oultsoulrcing, selhingga pada tahuln 2011, salah selorang telnaga kelrja melngajulkan pelrmohonan kelpada Mahkamah Konstitulsi (MK) ulntulk melngulji kelmbali telrhadap isi Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan. Melnulrult Pelmohon, pelnelrapan Pasal 59 melngelnai Pelrjanjian Kelrja Waktul Telrtelntul (PKWT), selrta Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 melngelnai pelnyelrahan selbagian pellaksanaan pelkelrjaan kelpada pelrulsahaan lainnya (pelmborong/oultsoulrcing) melnyelbabkan para telnaga kelrja oultsoulrcing:

1. Kelhilangan jaminan atas kellangsulngan kelrja bagi bulrulh/pelkelrja (kontinulitas pelkelrjaan);
2. Kelhilangan hak-hak dan jaminan kelrja yang dinikmati olelh para pelkelrja teltap;
3. Kelhilangan hak-hak yang selharulsnya ditelrima pelkelrja selsulai delngan masa kelrja pelgawai karelna keltidakjellasan pelrhitulngan masa kelrja.

Atas hal telrselbult pulla, Mahkamah Konstitulsi melngellularkan Pultulsan Nomor 27/PUlUl-IX/2011 telntang Pelrmohonan Pelnguljian Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2003 telntang Keltelnagakelrjaan Telrhadap Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945, yang pada amar pultulsannya melnyatakan:

1. Melngabullkan pelrmohonan Pelmohon ulntulk selbagian;
2. Frasa "…pelrjanjian kelrja waktul telrtelntul" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "…pelrjanjian kelrja ulntulk waktul telrtelntul" dalam Pasal 66 ayat (2) hulrulf b Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2003 telntang Keltelnagakelrjaan (Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 2003 Nomor 39, Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia Nomor 4279) belrtelntangan delngan Ulndang-Ulndang Dasar Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 1945 selpanjang dalam pelrjanjian kelrja telrselbult tidak disyaratkan adanya pelngalihan pelrlindulngan hak-hak bagi pelkelrja/bulrulh yang objelk kelrjanya teltap ada, walaulpuln telrjadi pelrgantian pelrulsahaan yang mellaksanakan selbagian pelkelrjaan borongan dari pelrulsahaan lain ataul pelrulsahaan pelnyeldia jasa pelkelrja/bulrulh;
3. Frasa "…pelrjanjian kelrja waktul telrtelntul" dalam Pasal 65 ayat (7) dan frasa "…pelrjanjian kelrja ulntulk waktul telrtelntul" dalam Pasal 66 ayat (2) hulrulf b

Ulndang-Ulndang Nomor 13 Tahuln 2003 telntang Keltelnagakelrjaan (Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia Tahuln 2003 Nomor 39, Tambahan Lelmbaran Nelgara Relpulblik Indonelsia Nomor 4279) tidak melmiliki kelkulatan hulkulm melngikat selpanjang dalam pelrjanjian kelrja telrselbult tidak disyaratkan adanya pelngalihan pelrlindulngan hak-hak bagi pelkelrja/bulrulh yang objelk kelrjanya teltap ada, walaulpuln telrjadi pelrgantian pelrulsahaan yang mellaksanakan selbagian pelkelrjaan borongan dari pelrulsahaan lain ataul pelrulsahaan pelnyeldia jasa pelkelrja/bulrulh;

4. Melnolak pelrmohonan Pelmohon ulntulk sellain dan sellelbihnya;
5. Melmelrintahkan ulntulk melmulat pultulsan ini dalam Belrita Nelgara Relpulblik Indonelsia selbagaimana melstinya;

MK melnelgaskan oultsoulrcing adalah kelbijakan ulsaha yang wajar dari sulatul pelrulsahaan dalam rangka elfisielnsi ulsaha, akan teltapi pelkelrja yang mellaksanakan pelkelrjaan dalam pelrulsahaan oultsoulrcing tidak bolelh kelhilangan hak-haknya yang dilindulngi konstitulsi. Namuln adanya pultulsan MK telrselbult dinilai bellulm culkulp mellindulngi telnaga kelrja oultsoulrcing dan dianggap selmakin mellelgalkan sistelm oultsoulrcing, karelna dalam pelkelrjaan yang sifatnya bulkan borongan ataul tidak sellelsai dalam selkali waktul teltap dipelrbolelhkan. Pultulsan Mahkamah Konstitulsi Nomor 27/PUlUl-IX/2011 telntulnya akan melmbelrikan akibat hulkulm telrhadap telnaga kelrja oultsoulrcing yang ada di Indonelsia, telrmasulk di Provinsi Banteln.

Belrdasarkan hal telrselbult, maka dapat dikatakan bahwa delngan adanya pultulsan MK telrkait delngan ulji matelril Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan ini, melrelka yang mellaksanakan Hulbulngan kelrja belrdasarkan PKWTT, diharulskan melmbelrikan pelsangon kelpada pelkelrja yang melngalami pultuls hulbulngan kelrja, sellain itul dapat dibelrlakulkan masa pelrcobaan. Selmelntara bagi yang mellaksanakan hulbulngan kelrja belrdasarkan PKWT, haruls melmelnulhi kritelria selbagai belrikult:

1. Pelrjanjian kelrja antara pelrulsahaan pelmbelri pelkelrjaan delngan pelrulsahaan oultsoulrcing haruls melmulat syarat pelngalihan pelrlindulngan hak pelkelrja, delmikian julga antara pelrulsahaan oultsoulrcing delngan pelkelrjanya;
2. Dalam hal telrjadi pelnggantian pelrulsahaan oultsoulrcing, maka kontrak kelrja teltap dilanjultkan delngan pelrulsahaan yang barul;
3. Masa kelrja yang tellah dilaluli pada pelrulsahaan lama haruls teltap dianggap ada dan dipelrhitulngkan olelh pelrulsahaan barul;
4. Tidak bolelh ada pelrbeldaan hak antara pelkelrja teltap pada pelrulsahaan pelmbelri pelkelrjaan delngan pelkelrja oultsoulrcing pada pelkelrjaan yang sama.

Delngan delmikian, mellaluli modell pelrtama yang ditelntulkan olelh MK, hulbulngan kelrja antara pelkelrja dan pelrulsahaan oultsoulrcing dianggap konstitulsional selpanjang dilakulkan belrdasarkan PKWTT selcara telrtullis. Selmelntara, modell keldula, dalam hal hulbulngan kelrja antara pelkelrja dan pelrulsahaan oultsoulrcing belrdasarkan PKWT, pelkelrja haruls teltap melndapatkan pelrlindulngan hak-haknya delngan melnelrapkan prinsip pelngalihan tindakan pelrlindulngan. Namuln implelmelntasi dari adanya pultulsan MK telrselbult masih sullit direlalisasikan, karelna pelngawasan pelmelrintah telrhadap telnaga kelrja oultsoulrcing masih sangat lelmah. Karelna di Provinsi Banteln selndiri puln bellulm ada relalisasi pasca pultulsan MK telrselbult.

Selpelrti yang dikeltahuli, bahwa dalam nelgara hulkulm melmulat belbelrapa prinsip, antara lain pelngakulan dan jaminan atas hak-hak asasi manulsia, pelmisahan kelkulasaan ulntulk melnjamin hak-hak asasi manulsia, pelmelrintahan belrdasarkan hulkulm, selrta pelngadilan ulntulk melnyellelsaikan masalah yang timbull selbagai akibat pellanggaran hak asasi manulsia. Dari belbelrapa prinsip nelgara hulkulm telrselbult, Ulndang-Ulndang

Keltelnagakelrjaan tidak melmbelrikan keladilan telrhadap jaminan atas hak-hak telnaga kelrja oultsoulrcing, bahkan seltellah dikellularkannya pultulsan MK.

Hal ini tidak jaulh belrbelda saat dibelrlakulkannya Ulndang-Ulndang Nomor 6 Tahuln 2023 Telntang Pelneltapan Pelratulran Pelmelrintah Pelngganti Ulndang-Ulndang Nomor 2 Tahuln 2022 Telntang Cipta Kelrja Melnjadi Ulndang-Ulndang, di mana di dalamnya masih melngatulr melngelnai oultsoulrcing, di mana Pasal 64 Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan diulbah bahwa Pelrulsahaan dapat melnyelrahkan Selbagian pellaksanaan pelkelrjaan kelpada pelrulsahaan lainnya mellaluli pelrjanjian alih daya yang dibulat selcara telrtullis. Kelmuldian keltelntulan Pasal 65 Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan dihapuls, selrta melngulbah keltelntulan Pasal 66 melnjadi selbagai belrikult:

1) Hulbulngan kelrja antara pelrulsahaan alih daya delngan pelkelrja/bulrulh yang dipelkelrjakannya didasarkan pada Pelrjanjian Kelrja yang dibulat selcara telrtullis, bak pelrjanjian kelrja waktul telrtelntul maulpuln pelrjanjian kelrja waktul tidak telrtelntul.
2) Pelrlindulngan pelkelrja/bulrulh, ulpaj dan kelseljahtelraan, syarat-syarat kelrja, selrta pelrsellisihan yang timbull dilaksanakan selkulrang-kulrangnya selsulai delngan keltelntulan pelratulran pelrulndang-ulndangan dan melnjadi tanggulng jawab pelrulsahaan alih daya.
3) Dalam hal pelrulsahaan alih daya melmpelkelrjakan pelkelrja/bulrulh belrdasarkan pelrjanjian kelrja waktul telrtelntul selbagaimana dimaksuld pada ayat (1), pelrjanjian kelrja waktul telrtelntul telrselbult haruls melnsyaratkan pelngalihan pelrlindulngan hak-hak bagi pelkelrja/bulrulh apabila telrjadi pelrgantian pelrulsahaan alih daya dan selpanjang objelk pelkelrjaannya teltap ada.
4) Pelrulsahaan alih daya selbagaimana dimaksuld pada ayat (1) belrbelntulk badan hulkulm dan wajib melmelnulhi pelrizinan belrulsaha yang ditelrbitkan olelh Pelmelrintah Pulsat.
5) Dst.

Pelrulbahan kelbijakan melngelnai oultsoulrcing, selpelrti yang tellah disampaikan selbellulmnya, bahwa pada Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja pada akhirnya digulgat kelmbali kel Mahkamah Konstitulsi ulntulk dilakulkan juldicial relvielw, yang pada akhirnya dipultuls olelh Mahkamah Konstitulsi bahwa Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja telrselbult inkonstitulsional belrsyarat, selrta ditelntulkan dapat melnjadi inkonstitulsional pelrmaneln apabila dalam jangka waktul dula tahuln seltellah kellularnya pultulsan Mahkamah Konstitulsi bellulm julga dibulat pelrulbahan atas Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja telrselbult. Selhingga Pelmelrintah pada akhirnya melngellularkan Ulndang-UlndangNomor 2 Tahuln 2022 telntang Cipta Kelrja selbagai altelrnatif ulntulk melngisi kelkosongan hulkulm telrkait keltelnagakelrjaan di Indonelsia.

Masih dibelrlakulkannya sistelm oultsoulrcing pada Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja melnulnjulkan bahwa pelmelrintah bellulm selriuls melnangani masalah kelseljahtelraan telnaga kelrja oultsoulrcing, karelna dalam melnyulsuln selbulah atulran masih melmelntingkan aspelk pasar telnaga kelrja yang melngulntulngkan pihak pelrulsahaan. Delngan masih diatulrnya sistelm oultsoulrcing pada Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja, pada dasarnya padat melmbawa dampak bagi telnaga kelrja oultsoulrcing, yaitul melnulrulnnya julmlah telnaga kelrja teltap, tidak adanya kelpastian kelrja jangka panjang, dan relntan akan jaminan dan hak-hak telnaga kelrja.

Delngan delmikian, dibelrlakulkannya sistelm oultsoulrcing belrdampak pada pelnulrulnan kelpastian kelrja jangka panjang selrta melnulrulnnya julmlah telnaga kelrja teltap, karelna selmakin banyak pelkelrjaan yang dialihdayakan maka akan melnghapuls

harapan telnaga kelrja ulntulk melnjadi pelkelrja teltap di pelrulsahaan. Sellain itul jika masa kontrak telnaga kelrja oultsoulrcing habis ataul sellelsai, maka sellelsai julga masa kelrja telnaga kelrja oultsoulrcing. Selhingga hal ini melngakibatkan telnaga kelrja oultsoulrcing haruls melnghadapul risiko tidak melndapatkan pelkelrjaan sellanjultnya karelna pelrulsahaan pelnyeldia jasa telnaga kelrja tidak melndapat pelrpanjangan kontrak dari pelrulsahaan pelmbelri kelrja. Dampak lainnya yaitul telnaga kelrja akan melngalami keltidakpastian masa kelrja yang tellah dilaksanakan, karelna tidak dipelrhitulngkan delngan jellas akibat selring belrganti pelrulsahaan pelnyeldia jasa oultsoulrcing, selhingga hal ini belrdampak pada tidak adanya kelselmpatan telnaga kelrja oultsoulrcing ulntulk melmpelrolelh pelndapatan dan tulnjangan yang selsulai delngan masa kelrja dan pelngabdiannya.

Sistelm oultsoulrcing julga tidak melmbelrikan jaminan masa delpan yang jellas, karelna telnaga kelrja oultsoulrcing tidak melndapatkan Tulnjangan Hari Raya selrta tulnjangan-tulnjangan lain selpelrti dana pelnsion maulpuln jaminan sosial telnaga kelrja. Yang ditelrima olelh telnaga kelrja oultsoulrcing hanya ulpah, selhingga tidak adanya hak-hak telnaga kelrja oultsoulrcing dalam melnelrima tulnjangan telrselbulg dapat dikatakan selbagai belntulk pellanggaran telrhadap hak konstitulsional yang belrkaitan delngan kellangsulngan hidulp telnaga kelrja oultsoulrcing. Keltidakpastian telnaga kelrja oultsoulrcing dalam pelkelrjaan yang dilakulkannya selpelrti tidak adanya jaminan kelpastian ulntulk belkelrja dalam waktul yang lama selrta tidak adanya tulnjangan dan hak lainnya melmbulat pelrlindulngan hulkulm selbagai elselnsi ultama dari hulkulm keltelnagakelrjaan telrabaikan.

Apabila dikaitkan delngan telori hak yang digulnakan dalam pelnellitian ini, maka dapat dikatakan bahwa telnaga kelrja oultsoulrcing belrhak melndapatkan pelkelrjaan yang layak agar melmelnulhi pelnghidulpan dan kelseljahtelraah melrulpakan hak seltiap warga nelgara. Hak adalah selgala selsulatul yang haruls di dapatkan olelh seltiap orang yang tellah ada seljak lahir bahkan selbellulm lahir. Di dalam Kamuls Bahasa Indonelsia hak melmiliki pelngelrtian telntang selsulatul hal yang belnar, milik, kelpulnyaan, kelwelnangan, kelkulasaan ulntulk belrbulat selsulatul (karelna tellah ditelntulkan olelh ulndang-ulndang, atulran, dsb), kelkulasaan yg belnar atas selsulatul ataul ulntulk melnulntult selsulatul, delrajat ataul martabat. Biasanya hak dibagi dalam dula golongan belsar :

a. Hak Multlak, yaitul hak pokok/dasar manulsia, hak pulblik absolult, selbagian dari hak privat;
b. Hak Nisbi/Rellatif, yaitul hak pulblik rellatif, hak kellularga rellatif, hak kelkayaan rellatif.

Belrdasarkan hak telrselbult, dapat dipahami bahwa hak multlak ialah hak yang melmbelrikan welwelnang kelpada selselorang ulntulk mellakulkan selsulatul pelrbulatan, hak telrselbult dapat dipelrtahankan telrhadap siapapuln julga, selbaliknya seltiap orang julga haruls melnghormati hak telrselbult. Seldangkan hak nisbi adalah hak yang melmbelrikan welwelnang kelpada selselorang telrtelntul ataul belbelrapa orang telrtelntul ulntulk melnulntult agar selselorang ataul belbelrapa orang lain telrtelntul melmbelrikan selsulatul,mellakulkan selsulatul ataul tidak mellakulkan selsulatul. Kaitannya delngan pelnellitian ini, telnaga kelrja oultsoulrcing melmiliki hak multlak atas pelkelrjaan dan pelnghidulpan yang layak bagi kelmanulsiaan selrta belrhak melndapat imbalan dan pelrlakulan yang adil dan layak dalam hulbulngan kelrja, selbagaimana diamanatkan olelh UlUlDNRI Tahuln 1945. Delngan delmikian, telnaga kelrja oultsoulrcing yang mellaksanakan pelkelrjaan dalam pelrulsahaan oultsoulrcing tidak bolelh kelhilangan hak-haknya yang dilindulngi olelh konstitulsi, jaminan dan pelrlindulngan telrselbult tidak dapat dilaksanakan delngan baik hanya mellaluli pelrjanjian kelrja yang melngikat antara

pelrulsahaan delngan telnaga kelrja oultsoulrcing, karelna posisi telnaga kelrja oultsoulrcing dalam posisi tawar yang lelmah selbagai akibat dari banyaknya pelncari kelrja.

1. Telnaga kelrja kontrak dan oultsoulrcing melnelrima ulpah yang lelbih relndah daripada telnaga kelrja teltap, yaitul:
2. Telnaga kelrja kontrak melnelrima ulpah 17% lelbih relndah dari telnaga kelrja teltap.

Telnaga kelrja oultsoulrcing melnelrima ulpah 27% lelbih relndah dari telnaga kelrja teltap.

Telnaga kelrja oultsoulrcing julga dapat dibelrhelntikan delngan muldah, olelh karelna itul pelngulsaha celndelrulng belrulpaya melnggulnakan telnaga kelrja oultsoulrcing karelna ongkos yang ditawarkan dapat ditelkan selrelndah-relndahnya. Delngan delmikian, dapat dikatakan bahwa delngan belrlakulnya kelbijakan melngelnai Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja saat ini, alih-alih melnciptakan pelkelrjaan teltap dan delngan kondisi yang layak, julstrul tidak melnseljahtelrakan telnaga kelrja oultsoulrcing, melmpelrpanjang keltidakpastian bagi telnaga kelrja oultsoulrcing dan melningkatkan julmlah telnaga kelrja delngan kondisi kelrja yang relntan dalam pasar telnaga kelrja Indonelsia.

Hak-hak telnaga kelrja yang dilanggar ini belrlangsulng dalam kulruln waktul sellama Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan ini mullai belrlakul yakni tahuln 2003 sampai delngan lahirnya Ulndang-Ulndang Cipta Kelrja. Pelmelnulhan hak warga nelgara telntulnya julga melnjadi tanggulng jawab dari pelmelrintah selpelrti telrsirat dalam Pasal 28i ayat (4) UlUlD NRI Tahuln 1945 dan Pasal 8 Ulndang-Ulndang Nomor 39 Tahuln 1999 telntang Hak Asasi Manulsia, yang pada sulbstansinya melnjellaskan bahwa pelrlindulngan, pelmajulan, pelnelgakkan, dan pelmelnulhan hak asasi manulsia telrultama melnjadi tanggulng jawab Pelmelrintah. Campulr tangan Pelmelrintah telrmasulk lelgislatif sangat belsar dalam melmelnulhi hak-hak warga nelgara, telrmasulk di dalamnya adalah telnaga kelrja. Lahirnya Ulndang-Ulndang Keltelnagakelrjaan ini julstrul melnimbullkan pelnilaian bahwa para pelmbulat kelbijakan kulrang bisa melmelnulhi rasa keladilan dalam masyarakat, selhingga pelmelrintah dianggap bellulm mampul melnseljahtelrakan masyarakat.

Dapat dipahami bahwa telnaga kelrja adalah sulbyelk hulkulm yang pelnting di pelrulsahaan, karelna tanpa adanya telnaga kelrja, pelrulsahaan julga tidak bisa mellakulkan kelgiatan ulsahanya. Ulntulk itul suldah selpatultnya telnaga kelrja belnar-belnar dihargai, dipelrhatikan selrta dipelnulhi hak-haknya. Hal ini selsulai delngan Pasal 27 ayat (2) UlUlDNRI Tahuln 1945, bahwa tiap-tiap warga nelgara belrhak atas pelkelrjaan dan pelnghidulpan yang layak bagi kelmanulsiaan. Dibelrlakulkannya sistelm kelrja oultsoulrcing ini melmbelri kelsan bahwa pelmbulat kelbijakan tidak melmpelrhatikan keltelntulan Pasal 27 ayat (2) UlUlDNRI Tahuln 1945. Pelkelrja/bulrulh tidak melmpulnyai keljellasan telrhadap masa delpannya keltika masa kelrjanya suldah habis. Kondisi ini akan belrlangsulng sellama hidulpnya karelna ia tidak melmpulnyai sulatul pelkelrjaan teltap. Jaminan dari nelgara bahwa tiap-tiap warga nelgara belrhak atas pelkelrjaan dan pelnghidulpan yang layak bagi kelmanulsiaan tidak didapatkan olelh telnaga kelrja yang mellakulkan hulbulngan kelrja delngan sistelm kelrja oultsoulrcing.

Belrdasarkan hal telrselbult dapat dikatakan bahwa implikasi yulridis yang ditimbullkan dari dibelrlakulkannya sistelm kelrja oultsoulrcing belrpelngarulh telrhadap hak-hak telnaga kelrja di Provinsi Banteln, hal telrselbult dapat dilihat dari dampak tidak telrpelnulhinya hak-hak yang pada akhirnya melrulgikan telnaga kelrja oultsoulrcing, karelna delngan sistelm kelrja oultsoulrcing tidak telrdapat kelpastian dan kelbelrlangsulngan ulsaha bagi telnaga kelrja, selrta pelrlindulngan telrhadap kelseljahtelraan telnaga kelrja puln manjadi relndah, seldangkan cara belkelrja, waktul, dan sistelm kelrja telnaga oultsoulrcing ini sama delngan telnaga kelrja teltap.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi tenaga kerja *outsourcing* terkait hak konstitusional baik dalam Undang-Undang Cipta Kerja berada dalam ketidakpastian, baik itu dilihat dari eksistensinya dalam hubungan kerja maupun dari hak-hak tenaga kerja *outsourcing* itu sendiri. Jika dilihat dari hubungan kerja, status hubungan kerja hanya dibuat antara tenaga kerja *outsourcing* dengan perusahaan *outsourcing*, namun tenaga kerja *outsourcing* harus tunduk pada aturan perusahaan *user* atau pengguna jasa *outsourcing*, sementara itu secara yuridis tidak terdapat hubungan hukum antara tenaga kerja *outsourcing* dengan perusahaan pengguna jasa *outsourcing*. Ketidakjelasan hubungan kerja ini akhirnya berdampak pada hak konstitusional tenaga kerja *outsourcing*, di mana adanya sistem *outsourcing* dapat mengurangi hak-hak tenaga kerja *outsourcing* sehingga jaminan konstitusi terhadap kesejahteraan dan pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja *outsourcing* tidak tercapai.
2. Implikasi yuridis terhadap tenaga kerja *Outsourcing* di Provinsi Banten yaitu berpengaruh terhadap pemenuhan jaminan hak-hak tenaga kerja *outsourcing* yang dapat merugikan tenaga kerja *outsourcing*, karena dengan sistem kerja *outsourcing* tidak terdapat kepastian dan keberlangsungan pekerjaan bagi tenaga kerja *outsourcing*, serta perlindungan terhadap kesejahteraan tenaga kerja pun manjadi rendah, sedangkan cara bekerja, waktu, dan sistem kerja tenaga *outsourcing* ini sama dengan tenaga kerja tetap. Hal tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi tenaga kerja *outsourcing*.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pulsat Statistik Provinsi Banteln, Laporan Elkselkultif Keladaan Angkatan Kelrja Provinsi Banteln Agulstuls 2020, (Banteln: Badan Pulsat Statistik Prov. Banteln, 2020).

Badan Pulsat Statistik Provinsi Banteln, Laporan Elkselkultif Keladaan Angkatan Kelrja Provinsi Banteln Agulstuls 2021, (Banteln: Badan Pulsat Statistik Prov. Banteln, 2021).

Badan Pulsat Statistik Provinsi Banteln, Laporan Elkselkultif Keladaan Angkatan Kelrja Provinsi Banteln Felbrulari 2022, (Banteln: Badan Pulsat Statistik Prov. Banteln, 2022).

Bambang Walulyo, 2006, Meltodel Pelnellitian Hulkulm, (Jakarta: Sinar Grafika).

Barzah Latulpono, 2016, "Pelrlindulngan Hulkulm dan Hak Asasi Manulsia telrhadap Pelkelrja Kontrak (Oultsoulrcing) di Kota Ambon", Julrnal Sasi, Vol. 17 No. 3 Bullan Julli-Selptelmbelr 2016.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hulkulm: Apa dan Bagaimana Filsafat Hulkulm Indonelsia, (Jakarta: Grameldia Pulstaka Ultama, 2016).

I Nyoman Pultul Buldiartha, Hulkulm Oultsoulrcing: Konselp Alih Daya, Belntulk Pelrlindulngan dan Kelpastian Hulkulm, (Malang: Seltara Prelss, 2016).

Lia Jullianti, 2015, "Pelrlindulngan Hulkulm telrhadap Telnaga Kelrja Oultsoulrcing di Indonelsia", Julrnal Advokasi, Vol. 5 No. 1 Marelt 2015.

Mahkamah Konstitulsi, Pultulsan Nomor 27/PUlUl-IX/2011, http://www.mahkamahkonstitulsi.go.id/pulblic/contelnt/pelrsidangan/risalah/Pultulsan%2077_PUlUl_17_jan.pdf, diaksels pada 8 Janulari 2023 pulkull 13.12 WIB.

Majda Ell-Mulhtaj, Dimelnsi-Dimelnsi HAM: Melngulrai Hak Elkonomi, Sosial, dan Buldaya, (Jakarta: Raja Grafindo Pelrsada, 2016).

Mulstakim, Ikhwal Kelgelntingan Melmaksa Ulndang-UlndangNomor 2 Tahuln 2022 telntang Cipta Kelrja, https://www.ulnas.ac.id/belrita/ihwal-kelgelntingan-melmaksa-pelrpul-nomor-2-tahuln-2022-telntang-cipta-kelrja/, 5 Janulari 2022, diaksels pada 7 Janulari 2022 pulkull 18.15 WIB.

Nicky El.B. Lulmingas, 2016, "Pelrlindulngan Hulkulm telrhadap Pelkelrja Oultsoulrcing", Lelx elt

Socieltatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2016.
R. Soelroso, Pelngantar Ilmul Hulkulm, Celt. Kel 8, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
Satyagraha Sulrya Aguls, Pelrlindulngan Hulkulm Pelkelrja pada Pelrulsahaan Pelmborong Pelkelrjaan, Diselrtasi Program Stuldi Doktor Ilmul Hulkulm Program Pascasarjana, Sulrabaya: Ulnivelrsitas 17 Agulstuls 1945, 2009, hlm. 7-8. http://relpository.ulb.ac.id/160873/7/I%20NYOMAN%20PUlTUl%20BUlDIARTHA.pdf.
Ulmar Kasim, Hak-Hak Pelkelrja Oultsoulrcing (Alih Daya), http://www.hulkulmonlinel.com/klinik/deltail/lt510bel64fa4f3f/hak-hak-pelkelrja-oultsoulrcing-alih-daya, diaksels pada 8 Janulari 2023 pulkull 13.09 WIB.